



JSEP

Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian

(Journal of Social and Agricultural Economics)



IMPLEMENTASI SERTIFIKASI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL SYSTEM (ISPO)* PADA PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA DI KABUPATEN SANGGAU

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL SYSTEM (ISPO) CERTIFICATION FOR INDEPENDENT OIL PALM SMALLHOLDERS IN SANGAU REGENCY

Sabinus^{1*}, Erlinda Yurisinthae¹, Shenny Oktoriana¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura

*Corresponding author's email: sabinus96@student.untan.ac.id

Submitted: 03/12/2020 Revised: 14/06/2021 Accepted: 31/07/2021

ABSTRACT

The increase in the number of smallholders (Independent farmers) in Bonti District faces challenges from limited knowledge about cultivation, optimizing the use of production factors, sustainability in production, and the absence of institutions (farmer groups, cooperatives, and farmer groups combined) so that it becomes a problem in the application of the 4 principles and 20 ISPO criteria. The purpose of this study is to analyze the formation of independent farmer groups within the ISPO certification framework. The research method uses the descriptive approach to analyze institutional conditions based on ISPO criteria also uses fishbone diagrams to find out the main problems and to create solutions. The results of this research show the farmers' institutional principles have not been implemented, while 65.96% of the ISPO criteria have not been implemented and only 34.04% of the ISPO criteria have been implemented by farmers. The absence of farmer groups, data collection, and counseling for independent farmer groups in Upe Village. However, farmers show a good response to the initiation of the farmer groups' formation because there is hope that it will facilitate production inputs and the sale of TBS.

Keywords: ISPO, Independent Oil Palm Farmers, Institutional Farmers

ABSTRAK

Peningkatan jumlah petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Bonti menghadapi tantangan dari pengetahuan yang terbatas tentang budidaya, optimalisasi penggunaan faktor produksi, keberlanjutan dalam produksi dan belum terdapatnya kelembagaan (kelompok tani, koperasi dan gabungan kelompok tani) sehingga menjadi masalah dalam kerja sama untuk penerapan 4 prinsip dan 20 kriteria ISPO. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembentukan kelompok tani sawit swadaya dalam kerangka sertifikasi ISPO dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara deskriptif untuk menganalisis kondisi kelembagaan berdasarkan kriteria ISPO serta digunakan diagram fishbone untuk mengetahui permasalahan utama dan mendapatkan solusi. Dari hasil penelitian penerapan prinsip ISPO pada petani sawit swadaya di Kecamatan Bonti. Prinsip kelembagaan petani belum diterapkan, sedangkan untuk penerapan kriteria ISPO sebanyak 65,96% belum dijalankan dan hanya 34,04% kriteria ISPO yang sudah dijalankan petani. Belum ada kelompok tani, pendataan dan penyuluhan untuk kelompok tani sawit swadaya di Desa Upe. Namun respons petani terhadap inisiasi pembentukan kelompok tani sudah baik karena ada harapan dapat mempermudah penjualan TBS dan mendapatkan input produksi.

Kata Kunci: ISPO, Sawit Swadaya, Kelembagaan Petani



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

How to Cite: Sabinus, Yurisinthae, E., dan Oktoriana, S. (2021). Implementasi Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Sanggau. *JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2): 166-179.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,14 persen pada tahun 2017 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri pengolahan (Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2017). Salah satu sektor pertanian yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia, dimana kelapa sawit memiliki fungsi ganda, selain mempunyai fungsi ekonomis yang relatif tinggi, juga mampu meningkatkan fungsi sosial dan ekologi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memastikan keberlanjutan pengembangan industri minyak kelapa sawit adalah dengan membuat standar keberlanjutan kebun yang disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk melawan kampanye negatif yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. (Anwar.R. *et al.*, 2016).

Di Indonesia ada tiga pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu pola perusahaan, plasma dan swadaya. Menurut (Yutika *et al.*, 2019) pola swadaya adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sendiri, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pemasaran hasil tanpa melalui kemitraan usaha.

Menurut data BPS Kalimantan Barat tahun 2019 luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat terbesar adalah Kabupaten Sanggau dengan luas 149.597 ha. Dimana salah satu daerah kecamatan yang memiliki luas areal perkebunan rakyat dengan pola swadaya terbesar merupakan kecamatan Bonti yang memiliki luas lahan 3.332 ha dengan produksi tandan buah segar 17.600 ton (Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau).

Jumlah Petani sawit swadaya di Kecamatan Bonti pada tahun 2017, terdapat 3.679 kepala keluarga dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi 4.679 kepala keluarga. Petani swadaya menghadapi tantangan dari persyaratan sertifikasi ISPO terkait aspek legalitas dan lokasi kebun, kelembagaan pekebun dan pengolahan kebun, pengolahan dan pemantauan lingkungan, masalah lain seperti tingkat pengetahuan dan keterampilan petani swadaya, pengetahuan organisasi petani, pendanaan, dokumen hukum, praktik budidaya yang tepat dan catatan usahatani kebun. Kelembagaan petani menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan petani swadaya dalam lingkup sertifikasi ISPO, bukan hanya itu adanya kelembagaan juga membantu dalam mengakses input, finansial, pasar, informasi dan teknologi (Nurliza, 2019).

Belum terdapatnya kelembagaan petani sawit swadaya (kelompok tani, koperasi dan gapoktan) di Kecamatan Bonti menjadi masalah dalam kerjasama untuk penerapan prinsip dan kriteria ISPO, sehingga dalam pembentukan kelembagaan petani sawit swadaya diperlukan *context* (hubungan) antara petani. Unsur penumbuhan kelompok tani yang terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 (*Governmental rules*) dipersiapkan untuk penerapan pedoman (*operational rules*), sehingga kriteria ISPO dapat terealisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pembentukan kelompok tani sawit swadaya dalam kerangka prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO.

Dalam penerapan ISPO pada petani swadaya dengan penilaian 4 prinsip dan 20 kriteria sebesar 34,04% sudah di jalankan. Secara keseluruhan belum di jalankan petani. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yusmini & Heriyanto, 2011) dalam kesiapan

penerapan ISPO hanya dijalankan oleh sebagian kecil petani swadaya, dari seluruh indikator yang sudah dijalankan hanya sebesar 10% sampai 19,15% yang dijalankan petani swadaya. untuk membantu petani sawit swadaya di Desa Upe dalam persiapan sertifikasi ISPO di lakukan pembentukan kelembagaan berupa kelompok tani dengan menggunakan teori Lowndes & Lemprière (2018) serta untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi petani dalam membentuk kelompok tani di gunakan diagram Sebab-akibat (fishbone). Penelitian terkait penerapan ISPO sudah pernah dilakukan oleh Yusmini & Heriyanto (2011) dan Lowndes & Lemprière (2018), namun kebaruan penelitian ini dilakukan terhadap petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive method*) di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Dasar pertimbangannya yaitu jumlah perkebunan rakyat terbesar menurut data sekunder (BPS Kalimantan Barat 2018) salah satu wilayah perkebunan sawit di Kalimantan Barat yang mengalami peningkatan jumlah petani pada tahun 2017 terdapat 3.679 kepala keluarga dan meningkat pada tahun 2018, menjadi 4.679 kepala keluarga. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bonti, Desa Upe, sebagai daerah dengan jumlah petani sawit swadaya terbesar di Kecamatan Bonti 121 kepala keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017).

Penentuan sampel sebanyak 38 petani dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan penilaian atau pandangan dari peneliti berdasarkan tujuan dan maksud penelitian (Putri *at al.*, 2015). Kriteria penentuan responden berdasarkan umur, kelompok usia dewasa awal, pengalaman dan tingkat pendidikan formal. Menurut Darmawi (2012) Umur yang digolongkan dewasa awal sangat produktif serta memiliki stamina yang kuat dalam bekerja serta pengalaman lamanya bertani yang diperoleh secara turun-temurun membuat petani dapat mengelola usaha mereka dengan baik. Serta tingkat pendidikan formal, menurut (Hapsari *at al.*, 2019) pendidikan formal akan berpengaruh terhadap produktivitas usahatani, akses informasi, serta tingkat penyerapannya atas aplikasi dan teknologi yang akan berdampak terhadap partisipasi dan daya adopsi .

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari petani sawit swadaya dengan metode wawancara berdasarkan daftar pertanyaan (*quisitioner*) yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari Badan pusat statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan Peraturan Menteri. Untuk mengetahui kondisi kelembagaan di Desa Upe dilakukan analisis deskriptif berdasarkan kriteria ISPO, dari hasil analisis diambil satu permasalahan utama dan dianalisis dengan diagram *fishbone* untuk mendapatkan solusi. Dengan mengidentifikasi melalui *man* (manusia yang terlibat), *method* (pedoman pelaksanaan), *material* (tanaman sawit tanaman yang sedang diusahakan petani), *environment* (keadaan atau lingkungan yang mendukung).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau

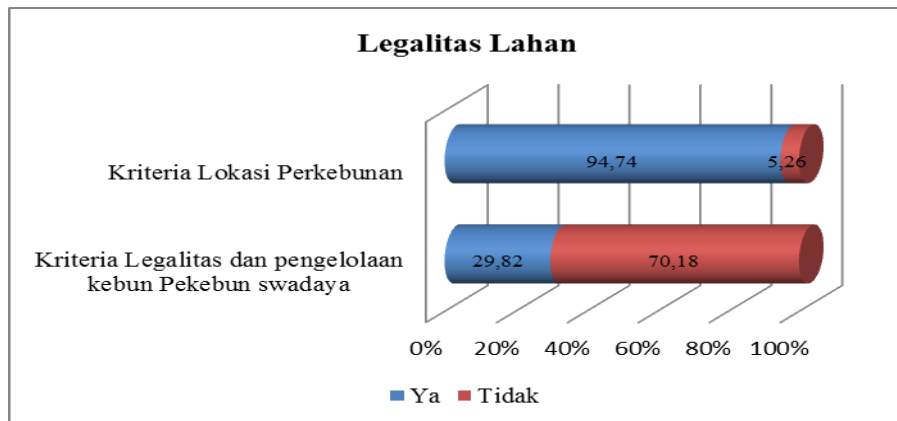
Luas areal perkebunan yang dimiliki petani sawit swadaya di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau secara keseluruhan kurang dari 5 Ha dengan status kepemilikan lahan sertifikat hak milik serta ditanam dengan pola monokultur dengan hasil produksi 1-5 ton dan tumpang sari dengan hasil produksi ≤ 1 ton. Menurut Nengsih (2016) produksi tanaman kelapa sawit sistem monokultur lebih tinggi dari sistem polikultur (tumpang sari) karena tanaman sawit yang ditanam dengan polikultur akan menyebabkan pertumbuhan lingkaran batang kecil, populasi tanaman lebih banyak (melebihi populasi optimum) sehingga akan terjadi persaingan dalam hal penyerapan unsur hara dan air dalam tanah dan persaingan mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis.

Budidaya kelapa sawit swadaya dilakukan petani dengan pedoman teknis budidaya yang diperoleh dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Parindu dengan jenis bibit Marihat. Mutu bibit kelapa sawit sangat mempengaruhi hasil dan kualitas kelapa sawit, oleh karena itu penggunaan bibit unggul merupakan persyaratan utama dalam pengembangan budidaya kelapa sawit (Roy Marulitua Tampubolon, 2019). Perkebunan lokasi penelitian didominasi tanah mineral sehingga jenis bibit varietas Marihat disarankan karena memiliki daya adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi air tanah dan lingkungan (Maryani, 2012).

Penerapan Prinsip ISPO Petani Sawit Swadaya Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau

Penerapan ISPO merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, tentang *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Standar ISPO untuk perkebunan kelapa sawit swadaya terdiri dari 4 prinsip yaitu: 1) legalitas lahan, 2) organisasi pekebun, 3) pengolahan kebun, 4) pemantauan lingkungan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan) dan 20 Kriteria yaitu: 1) lokasi perkebunan, 2) pengolahan kebun, 3) pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, 4) sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya, 5) organisasi kelembagaan kebun swadaya, 6) penjualan TBS, 7) kesepakatan harga TBS, 8) pengangkutan buah, 9) pemanenan, 10) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), 11) pemeliharaan tanaman, 12) penanaman lahan pada lahan gambut, 13) penanaman pada tanah mineral, 14) pembenihan, 15) pembukaan lahan, 16) peningkatan usaha secara berkelanjutan, 17) pelestarian *biodiversity*, 18) pencegahan kebakaran, 19) penanggulangan kebakaran, 20) kewajiban terkait izin lingkungan. Penerapan prinsip ISPO di mulai dari legalitas lahan disajikan pada gambar 1.

Prinsip legalitas lahan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah dimana kebun yang berada di dalam kawasan hutan, tanah negara, dan areal Hak Guna Usaha (HGU) tidak bisa memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Tanah dengan klaim yang tumpang tindih dipandang tanah bermasalah yang harus dikeluarkan dari ISPO (Dharmawan et al., 2019)

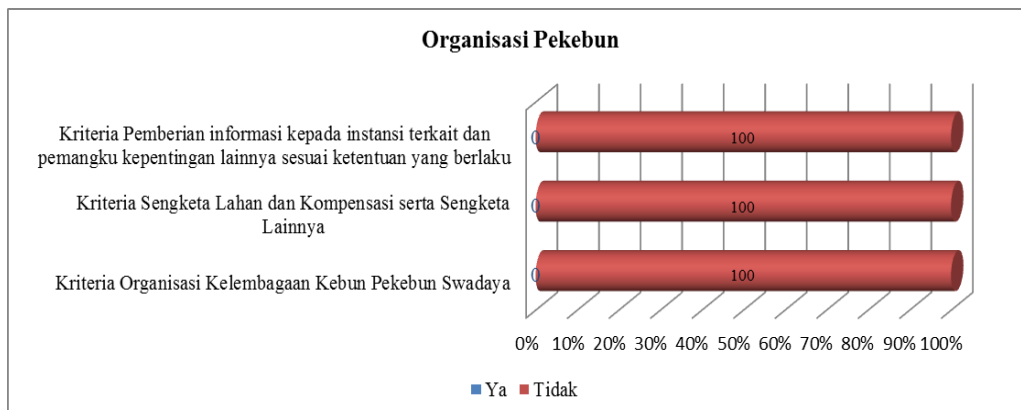


Gambar 1 Legalitas Lahan Petani Sawit Swadaya Desa Upe.

Sumber: Data Primer (2020)

Kriteria legalitas dan pengolahan kebun swadaya di Desa Upe hanya 29,82 persen. Indikator legalitas dan pengolahan kebun yang diterapkan petani berupa sertifikat tanah (89,47 persen), sedangkan untuk surat daftar usaha (STD-B) dan tanda bukti Pekebun masuk kelompok tani dan koperasi belum diterapkan petani. Kriteria lokasi perkebunan petani di Desa Upe (94,74 persen) indikator lokasi kebun sesuai dengan tata ruang setempat (92,11 persen) dan jarak lokasi kebun menuju pabrik sudah terjangkau (97,36 persen) sehingga untuk TBS bisa terjaga kualitasnya, selain itu jarak juga mempengaruhi biaya transportasi yang dikeluarkan petani (Maulana *at al.*, 2018).

Selain legalitas lahan standar yang harus dimiliki petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah kelembagaan petani. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial, (Aini & Nadida, 2014). Keberadaan kelembagaan petani sawit swadaya Desa Upe dapat dilihat pada Gambar 2.

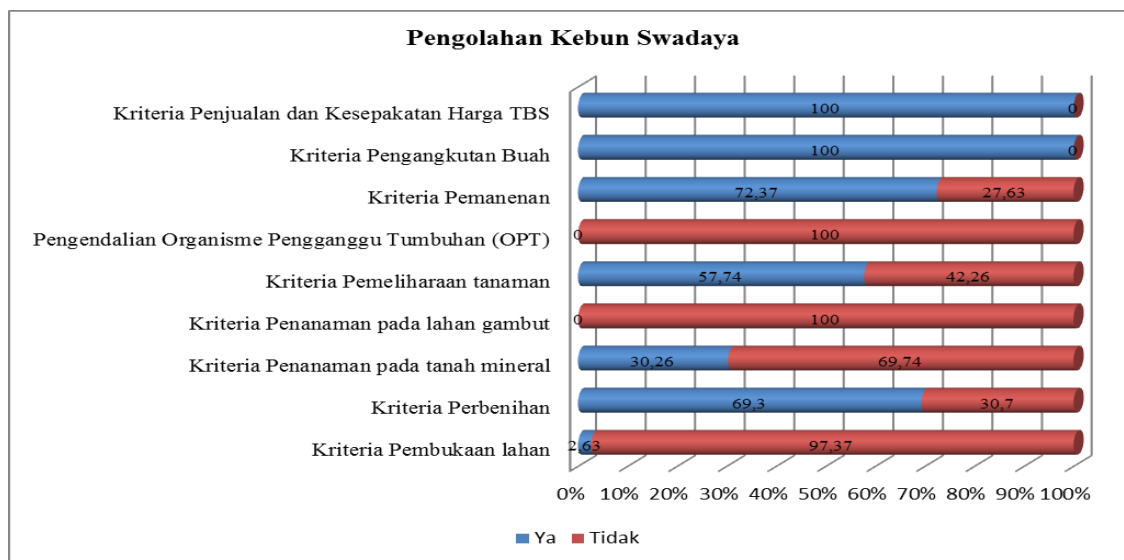


Gambar 2 Kelembagaan Petani Sawit Swadaya Desa Upe.

Sumber: Data Primer (2020)

Petani sawit swadaya Desa Upe sampai saat ini belum memiliki kelompok tani ataupun koperasi yang legal hanya saja terdapat kelompok kerja ataupun kelompok arisan sehingga belum terdapat sumber informasi, dokumen sengketa lahan dan kartu anggota atau catatan sebagai anggota kelompok tani/koperasi. Untuk kegiatan operasional seperti pembukaan lahan dan pembersihan gulma dilakukan bersama-sama melalui kelompok kerja dan kelompok arisan.

Kelompok yang belum mendapat legalitas memiliki potensi untuk dikembangkan supaya dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri dalam melakukan kegiatan pertanian. Anantanyu (2011) kelembagaan membantu petani karena memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program dan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program sehingga dapat membantu memecahkan masalah dalam pembangunan pertanian melalui partisipasi kelompok yang kolektif. Selain kelembagaan petani, prinsip ISPO yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan adalah teknis budidaya dan pengangkutan, disajikan pada Gambar 3.



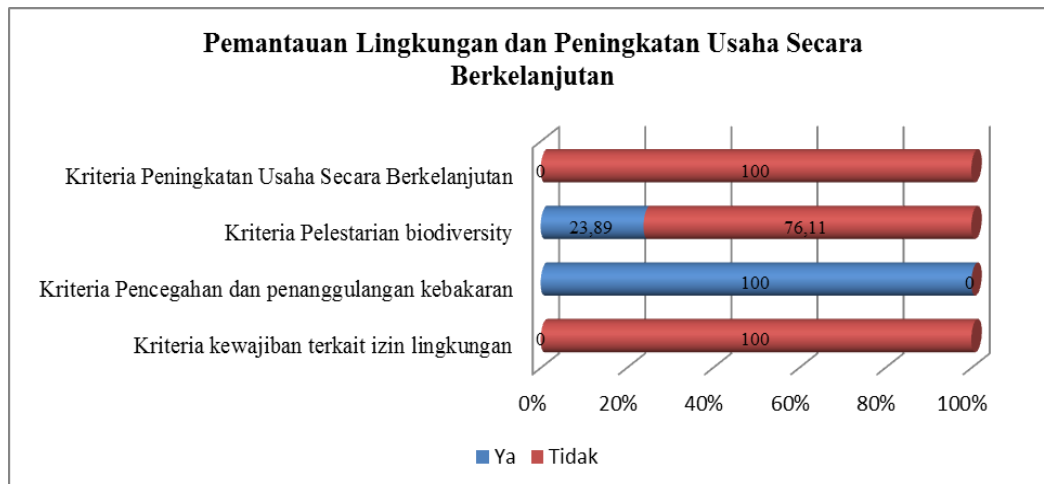
Gambar 3 Pengolahan Kebun.

Sumber: Data primer (2020)

Persentase terendah dalam Pengolahan Kebun di Desa Upe pada kriteria pembukaan lahan 2,63 persen. Sebagian besar petani melakukan pembakaran lahan untuk meminimalisir biaya, sebelum lahan ditanam sawit terlebih dahulu dijadikan ladang. Dampak terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pencemaran udara dan dari segi kesehatan, asap akan menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan membuka lahan tanpa bakar (*zero burning policy*) dengan manfaat lahan dapat ditanam setelah 1 sampai 2 bulan sehingga waktu teknik tanpa bakar lebih efisien (Dwijanarko *et al.*, 2020). Selain kriteria pembukaan lahan persentase terendah adalah pelaksanaan penanaman pada lahan gambut dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dikarenakan lahan yang diusahakan tidak terdapat lahan gambut dan petani menganggap usaha yang dilakukan bukan skala yang besar sehingga tidak perlu dilakukan pengendalian OPT.

Pengolahan lahan berdampak pada kegiatan pemantauan lingkungan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan, disajikan pada gambar 4. Petani belum membuat SPPL (surat Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan) sebagai surat izin lingkungan karena petani belum mengetahui tentang SPPL dan tidak adanya informasi untuk mendapatkan SPPL.



Gambar 4 Pemantauan Lingkungan dan Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
Sumber: Data Primer (2020)

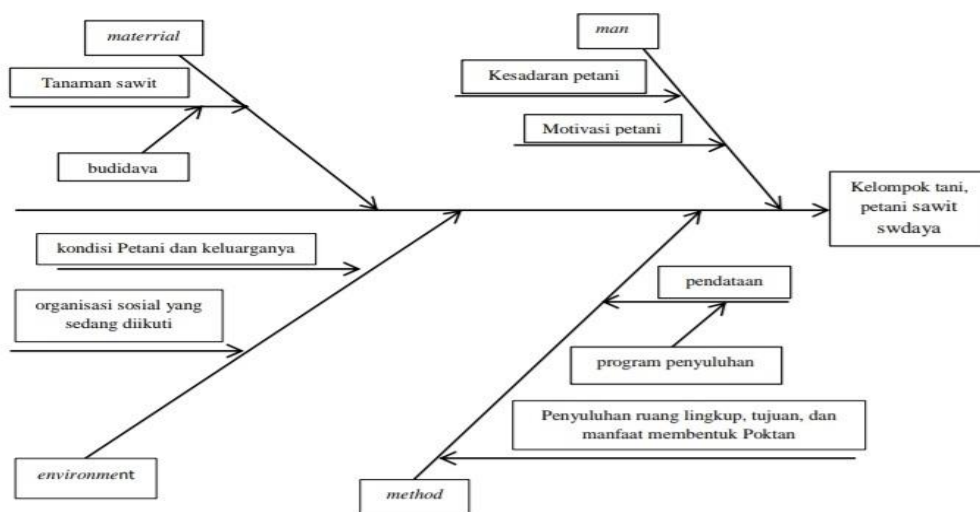
Prinsip pemantauan lingkungan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan kriteria kewajiban terkait izin lingkungan dan kriteria peningkatan usaha secara berkelanjutan belum dilakukan. Untuk kriteria pelestarian *biodiversity* (23,89 persen) disebabkan karena pola pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar sehingga ekosistem dan lingkungan hidup satwa dan tumbuhan mengalami kerusakan, namun petani mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan tetapi belum ada usaha yang dilakukan untuk kegiatan pelestarian.

Pembentukan Kelompok Tani, Petani Sawit Swadaya di Desa Upe

Kelompok tani didefinisi sebagai kumpulan orang-orang tani yang terdiri dari petani dewasa, pria dan wanita, tua dan muda yang terikat secara informal dalam suatu wilayah atas kebutuhan bersama. Kelompok tani merupakan kelembagaan petani yang langsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usahanya (Nuryanti & Swastika, 2016).

Di Desa Upe belum terdapat kelompok tani yang legal dilihat dari prinsip organisasi pekebun sehingga tidak terdapat sumber informasi serta dokumen sengketa lahan dan kompensasi, namun kelompok tani dapat ditumbuhkan melalui kelompok kerja, kelompok arisan dan dibentuk dari petani sawit swadaya yang berjumlah 121 kepala keluarga, menurut Permetan No. 67 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, persyaratan membentuk kelompok tani dapat dilakukan jika terdapat 20-30 petani.

Komponen yang mempengaruhi dan menjadi penyebab membentuk kelompok tani digunakan analisis *fishbone* dengan mengidentifikasi melalui *man* (manusia yang terlibat) yaitu petani sawit swadaya dengan kriteria luas lahan ≤ 5 Ha, *method* (pedoman pelaksanaan) penumbuhan kelompok tani yang disesuaikan menurut (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani), *material* (tanaman sawit tanaman yang sedang diusahakan petani), *environment* (keadaan atau lingkungan yang mendukung), gambar diagram yang telah disesuaikan ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Diagram Fishbone yang Disesuaikan.

1. Komponen pelaku yang terlibat (*Man*)

Belum adanya kesadaran petani akan manfaat kelompok tani hal ini dilihat dari belum adanya petani yang menjadi anggota kelompok tani (gambar 2) dikarenakan masih rendahnya pemahaman petani akan fungsi serta manfaat kelompok tani serta belum adanya edukasi sehingga dalam pemahaman kelompok tani hanya dianggap untuk kegiatan gotong royong dalam kegiatan usahatani dan kondisi usahatani sawit swadaya yang dikelola petani berada di lingkungan koperasi unit Desa milik petani plasma sehingga untuk memperoleh akses transportasi dan penjualan masih bisa dapatkan petani swadaya.

Perlu dilakukan edukasi serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang pemahaman manfaat serta fungsi kelompok tani. (Koampa *at al.*, 2015) kesadaran merupakan salah satu faktor dalam membentuk kelompok tani. Kelompok tani sebagai sarana kerjasama antara petani dengan harapan agar usaha tani akan lebih efisien, serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi serta untuk mencapai skala ekonomi, dipandang dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Penumbuhan kelompok tani dapat dilakukan dengan adanya dukungan dan penyuluhan untuk mengatasi hal tersebut dengan harapan menjadi anggota kelompok tani diharapkan memberi informasi yang lebih baik dalam mengelola lahan pertanian, merubah perilaku dan dapat saling membantu sesama anggota (Ramainas & Pasaribu, 2015).

Walaupun petani di Desa upe belum ada kesadaran dalam membentuk kelompok tani ataupun koperasi sikap serta respon petani di Desa Upe terhadap kelompok tani yang akan diinisiasi sudah baik, hal ini karena adanya harapan dengan adanya kelompok tani dapat mempermudah penjualan TBS dan mendapatkan input produksi. (Hidayanti *at al.*, 2015) motivasi merupakan sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang untuk bertindak serta memberikan kekuatan dan dorongan. Dengan adanya sikap serta respon yang baik dari petani, inisiasi pembentukan kelompok tani di Desa Upe dapat dilakukan dengan adanya motivasi petani.

Inisiasi pembentukan kelompok tani di Desa Upe dapat dilakukan dan didukung dari jumlah petani yang tersedia 121 orang dan luas lahan yang dimiliki petani dengan luas berkisar 1-5 ha. Luas lahan yang dimiliki oleh petani dapat berdampak terhadap tingkat motivasi karena semakin luas garapan yang dimiliki maka motivasi petani untuk mengembangkan usahanya semakin tinggi dan semakin sempit luas lahan yang dimiliki semakin rendah untuk mengembangkan dan menumbuhkan kelompok tani dengan kriteria luas lahan 0,00-0,50 (sempit), 0,51-2,00 (sedang) dan (>2) luas. Jika dikaitkan dengan luas lahan petani di Desa Upe dengan luas lahan pada kisaran 1-5 ha maka motivasi dalam usaha semakin tinggi dan motivasi dalam menumbuhkan kelompok tani dapat dilakukan (Farid, 2016).

2. Komponen bahan baku (*material*)

Bahan baku yang dimaksud adalah usahatani yang diusahakan yaitu tanaman sawit. Pembentukan kelompok tani, anggota poktan harus memiliki kegiatan usahatani sebagai mata pencaharian utama dan usahatani yang sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani). Usahatani yang diusahakan di Desa Upe dalam hal ini adalah kelapa sawit, usahatani ini juga sebagai mata pencarian utama bagi petani.

Pengelompokkan berdasarkan jumlah jenis tanaman yang ditanam dibagi menjadi 2 kelompok (Tumpang sari dan Monokultur) dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 97,36% responden menanam 1 jenis tanaman (tanaman sawit), proporsi responden yang menanam lebih dari 1 jenis tanaman sebesar 2,63%. Pemilihan jenis tanaman berkaitan dengan potensi lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya suatu tanaman di daerah tersebut. Petani di Desa Upe lebih banyak menanam sawit dikarenakan nilai jual dari kelapa sawit, tren peningkatan permintaan sawit maupun kondisi alamnya yang memungkinkan untuk penanaman kelapa sawit. Hasil penelitian di Desa Upe menunjukan kondisi petani dan keluarganya dalam keadaan baik hal ini diukur dari pendapatan yang diperoleh petani dengan persentase 71,05% mendapatkan 1-5 ton produksi Tandan Buah Segar (TBS). Hendayana (2002) dalam penelitian, (Islam, & Banda, 2018) kesejahteraan petani diukur dari nilai tukar petani (NTP) dari produksi dan pendapatan.

Apabila pendapatan mengalami peningkatan sebesar satu satuan (semakin tinggi), maka akan mengalami pengaruh positif terhadap perilaku petani. Tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi petani dalam melakukan keputusan maupun perencanaan terhadap peningkatan usaha pertaniannya, yang berkaitan seperti membeli jenis dan jumlah pupuk dan insektisida, pembelian bibit baru dan perbaikan lahan. Kondisi di desa upe untuk mendapatkan pupuk, pestisida, bibit, dan input produksi lainnya masih sulit didapatkan sehingga perlu adanya kelompok tani ataupun koperasi untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi. (Ramainas & Pasaribu, 2015)

Menurut (Ramdhani *at al.*, 2015) Kelompok tani sebagai bagian dari peran dan fungsi dalam suatu penggerak pembangunan pertanian di dalam suatu desa tersebut. Kegiatan yang berada di dalam kelompok tani berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti di dalam suatu penyediaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya.

3. Komponen pedoman pelaksanaan (*method*)

Pedoman atau cara dalam membentuk kelompok tani menurut (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani). Penyuluh pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi petani, data dan informasi tersebut meliputi kelompok sosial yang sedang diikuti dan pernah tidaknya menjadi anggota kelompok tani.

Pelaksanaan penumbuhan kelembagaan petani dapat dilakukan dengan pendekatan pada kelompok sosial masyarakat, dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan melalui pertemuan kelompok-kelompok sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan dengan materi: pemahaman tentang poktan, kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota poktan, fungsi poktan, ketentuan yang berlaku dalam poktan, syarat menjadi anggota poktan, ciri-ciri poktan yang mandiri. Proses penumbuhan poktan meliputi: penyuluh pertanian memberikan sosialisasi tentang penumbuhan poktan kepada masyarakat terutama kepada tokoh-tokohnya, dilakukan pertemuan dan musyawarah, kesepakatan membentuk poktan, pemilihan pengurus kelompok dan yang terakhir menetapkan rencana kerja kelompok (Munanto, 2016). Kesesuaian komponen *methode* di Desa Upe, penyuluhan kepada petani sawit swadaya untuk membentuk kelompok tani belum pernah dilakukan. Sehingga perlu adanya program penyuluhan untuk inisiasi pembentukan kelompok tani.

4. Komponen Lingkungan (*Environment*)

Pembentukan kelompok tani dalam (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani) didasari kesamaan lingkungan. Adhi Surya Perdana (2016) Menyatakan terbentuknya kelompok tani atas dasar kesamaan lingkungan geografis tempat tinggal hal ini sependapat dengan Kasdir Maulana (2019) kondisi lingkungan yang dimaksud memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a.) Saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota; b.) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani; c.) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.

Kondisi lingkungan petani sawit swadaya di Desa Upe memiliki kesamaan dalam tradisi, pemukiman, dan usahatani yang sedang berlangsung, bahasa maupun ekologi. sehingga pembentukan kelompok tani di Desa Upe dapat dilakukan. Kelompok tani dibentuk secara formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Paulus L. A. Tanasale & August E. Pattiselanno, 2020).

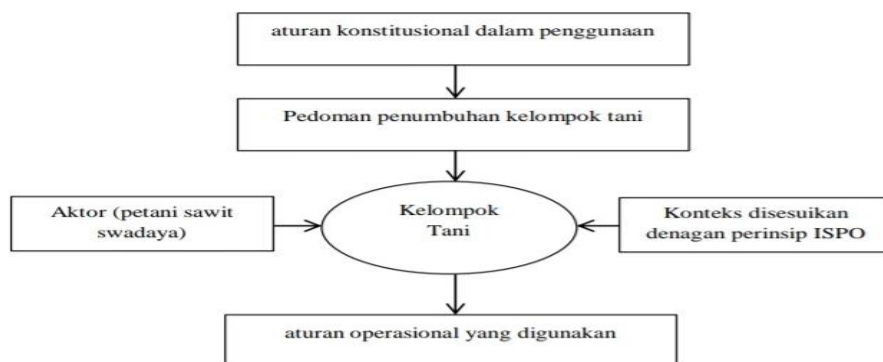
Proses Pembentukan Kelompok Tani

Hermanto (2011) dalam penelitian (Kaskoyo et al., 2017) pembentukan kelompok tani dilakukan dengan tujuan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya. Dalam hal ini melalui sertifikasi ISPO

petani sawit swadaya diarahkan ke praktik budidaya yang baik dan benar supaya dapat meningkatkan produksi petani serta dapat melakukan usahatani yang berkelanjutan.

Agar tercapainya praktek budidaya yang baik dan benar serta pertanian yang berkelanjutan dilakukan melalui 4 prinsip ISPO : 1) legalitas lahan, 2) organisasi pekebun, 3) pengolahan kebun, 4) pemantauan lingkungan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Untuk memudahkan implementasi ISPO dilakukan pembentukan kelompok tani.

Lowndes & Lemprière, (2018) Model proses pembentukan kelembagaan gambar 1 yang terdiri dari: 1) *constitutional rules-in-use* (aturan konstitusional dalam penggunaan), komponen ini disesuaikan dengan *governmental rules in-use* (peraturan pemerintah). 2) *actors* (orang yang berperan). 3) *context* (kondisi dimana suatu keadaan terjadi). 4) *operational rules in-use* (aturan operasional yang digunakan). Untuk penyesuaian cara pembentukan kelembagaan petani sawit swadaya di Desa Upe disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6 Pembentukan Kelompok Tani Sawit Swadaya.

Sumber : Lowndes & Lempriere, (2017) disesuaikan

Komponen yang terlibat, *constitutional rules-in-use* (aturan konstitusional dalam penggunaan), komponen ini disesuaikan dengan *governmental rules in-use* (peraturan pemerintah) melalui pedoman atau cara dalam membentuk kelompok tani menurut (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani). Dari komponen untuk membentuk kelompok tani di Desa Upe belum adanya edukasi serta penyuluhan yang diberikan kepada petani sawit swadaya oleh penyuluh pertanian.

Pedoman atau cara dalam membentuk kelompok tani disesuaikan dengan *actors* (orang yang berperan) dalam hal ini orang yang berperan adalah petani sawit swadaya, dimana kondisi sekarang jumlah petani sawit swadaya di Desa Upe 121 petani dengan demikian memenuhi persyaratan untuk membentuk kelompok tani dimana diketahui kelompok tani dibentuk dengan jumlah anggota 20 sampai 30 orang petani (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani).

Inisiasi pembentukan kelompok tani, petani sawit swadaya dilakukan dengan *context* (kondisi dimana suatu keadaan terjadi) untuk menginisiasi petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO melalui penerapan prinsip ISPO, selain itu pembentukan kelompok tani itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan petani mandiri yang berperan sebagai objek dalam pembangunan pertanian (Bayu Putra Pratama *at al.*, 2016)

Keadaan petani sawit swadaya di Desa Upe yang sebagian besar belum menerapkan prinsip ISPO, sehingga perlu dilakukan pembentukan kelompok tani. Untuk menjalankan kegiatan operasional petani pada kelompok tani perlu adanya aturan yang dibuat oleh kesepakatan anggota kelompok tani operational *rules in-use* (aturan operasional yang digunakan).

KESIMPULAN

Petani sawit swadaya di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau dalam penerapan 4 prinsip ISPO yaitu: legalitas lahan, kelembagaan petani, teknik budidaya dan pengolahan pemantauan lingkungan secara keseluruhan belum siap untuk sertifikasi. Diketahui untuk legalitas lahan 62,28%, kelembagaan 0%, pengolahan kebun 48,03% dan pemantauan lingkungan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan 31,58% petani yang menerapkan.

Dilihat dari keempat prinsip ISPO, kelembagaan petani sawit swadaya belum diterapkan hal ini dikarenakan kelembagaan yang terdapat di lingkungan petani hanya kelompok kerja dan arisan yang belum memiliki legalitas, sehingga pembentukan kelompok tani yang sesuai dengan kriteria sertifikasi ISPO tidak bisa dilakukan dikarenakan belum memenuhi persyaratan dalam prinsip ISPO terkait organisasi pekebun. Selain itu, masih rendahnya pemahaman petani akan fungsi serta manfaat kelompok tani karena belum adanya edukasi sehingga kelompok tani hanya dianggap untuk kegiatan gotong royong dalam kegiatan berusahatani.

Walaupun pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan kriteria ISPO tidak bisa dilakukan, inisiasi pembentukan kelembagaan petani dapat ditumbuhkan, dilihat dari diagram fishbone dan teori Lowndes & Lempriere, (2018) dimana Kondisi lingkungan petani sawit swadaya memiliki kesamaan dalam tradisi, pemukiman, dan usahatani yang sedang berlangsung, bahasa maupun ekologi, dengan jumlah petani sawit swadaya 121 kepala keluarga. Selain itu motivasi dari petani sawit swadaya untuk membentuk kelompok tani sudah baik dilihat dari harapan petani, dengan adanya kelompok tani dapat mempermudah penjualan TBS dan mendapatkan input produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, U. R. (2016). Faktor-Faktor Berpengaruh Dalam Pengembangan Motivasi Anggota Kelompok tani Di Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. *Triton*, 7(2), 1–10.
- Aini, Y. N., & Nadida, Z. (2014). Analisis Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi (Studi Kasus: Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat). *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 6(3), 140–221.
- Anantanyu, S. (2011). *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. 7(2), 102–109.
- Anwar.R., Sitorus.S.R.P., Fauzi.A.M., Widiatmaka., & Machfud. (2016). Pencapaian Standar Indonesia Sustainable Palm Oil (Ispo) Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur. *Jurnal Littri*, 22(1), 11–18. <https://doi.org/10.21082/Littri.V22n1.2016.11-18>
- Bayu Putra Pratama, Eri Sayamar, E. T. (2016). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Swadaya Kelapa Sawit Di Desa Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indigiri Hulu. *Jom Faperta*, 3(2), 1–12.

- Darmawi, D. (2012). Peranan Tenaga Kerja Keluarga Dalam Usaha Pemeliharaan Sapi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan Universitas Jambi*, 15(2), 48–58. <https://doi.org/10.22437/Jiip.V15i2.1590>
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., ... Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi Ispo: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304–315. <https://doi.org/10.14710/Jil.17.2.304-315>
- Dwijanarko, B., Rianawati, F., Kehutanan, J., Kehutanan, F., & Lambung, U. (2020). *Kabupaten Tanah Laut Cost Analysis Of Zero Burning Technique Of Clearing Land In Village Telaga Langsat District Takisung Districts Tanah Laut*. 03(3), 440–450.
- Hapsari, H., Rasmikayati, E., & Saefudin, B. R. (2019). Karakteristik Petani Dan Profil Usahatani Ubi Jalar Di Kec. Arjasari, Kab. Bandung. *Sosiohumaniora*, 21(3), 247–255. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.21288>
- Hidayanti, N., Cepriadi, & Sayamar, E. (2015). Motivasi Petani Kakao Dalam Bergabung Dalam Kelompok Tani Di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan. *Jom Faperta Vol.2 No.2 Oktober 2015*, 2(2), 1–10.
- Kasdir Maulana. (2019). *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*. 5, 67–71.
- Kaskoyo, H., Febryano, I. G., Yuwono, B., Kehutanan, J., Pertanian, F., Lampung, U., ... Lampung, B. (2017). *Institutional Study Of Farmers Group On Partnership Program In Kphp Way*. 5(1), 1–7.
- Koampa, M. V., Benu, O. L. S., Sendow, M. M., & Moniaga, V. R. B. (2015). Partisipasi Kelompok Tani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Desa Kanonang Lima, Kecamatan Kawangkoan Barat, Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 11(3a), 19. <https://doi.org/10.35791/Agrsosek.11.3a.2015.10294>
- Lowndes, V., & Lemprière, M. (2018). Understanding Variation In Processes Of Institutional Formation. *Political Studies*, 66(1), 226–244. <https://doi.org/10.1177/0032321717724325>
- M. Habibullah. (2018). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Maryani, A. T. (2012). Pengaruh Volume Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di Pembibitan Utama. *Fakultas Pertanian Universitas Jambi*, 1(2), 64–74.
- Maulana, R., Makmur, T., & Marsudi, E. (2018). Pengaruh Harga, Jarak Dan Biaya Pengangkutan Terhadap Volume Penjualan Buah Sawit Petani Pada Pt. Fajar Baizury & Brothers Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(1), 95–104.
- Munanto, T. (2016). Motivasi, Minat Dan Pengalaman Petani Pada Penumbuhan Dan Pembentukan Kelompok Tani Reguler Dan Komoditas Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul. *Ilmu-Ilmu Pertanian*, 23(1), 78–87.
- Nengsih, Y. (2016). *Tumpangsari Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq .) Dengan Tanaman Karet (Hevea Brassiliensis L .) Yulistiati Nengsih Program Studi Agroteknologi , Fakultas Pertanian Universitas Batanghari Pendahuluan*

Kelapa Sawit Merupakan Salah Satu Komoditi. 1(2), 69–77.

- Nurliza. (2019). *Model Adopsi Inovasi Kelembagaan*. Pontianak: Iain Pontianak Press.
- Nuryanti, S., & Swastika, D. K. S. (2016). Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 115. <https://doi.org/10.21082/Fae.V29n2.2011.115-128>
- Paulus L. A. Tanasale, August E. Pattiselanno, W. G. (2020). Perbandingan Kelompok Tani Di Kota Ambon (Studi Kasus Kelompok Tani Gunung Nona Negeri Amahusu Dan Negeri Tawiri). *Agribisnis Kepulauan*, 8(2), 149–161.
- Putri, E. A., Suwandari, A., & Ridjal, J. A. (2015). Analisis Pendapatan Dan Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau Maesan 2 Di Kabupaten Bondowoso. *Jsep*, 8(1), 64–69.
- Ramainas, & Pasaribu, A. (2015). Perilaku Masyarakat Petani Terhadap Penumbuhan Kelompok tani Di Kecamatan Sorkam Barat. *Jurnal Agrica Ekstensi*, 9(2), 37–46.
- Ramdhani, H., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2015). Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 423–429. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i3.13593>
- Roy Marulitua Tampubolon, I. (2019). Pengaruh Frekuensi Penyiraman Terhadap Total Luas Daun Pada Beberapa Jenis Bibit Unggul Kelapa Sawit (*Elaeis Guinensis* Jacq.) Yang Bermesokarp Tebal Di Main Nursery Umur 4 Sampai 7 Bulan. *Agroekoteknologi*, 7(2), 356–360. <https://doi.org/10.32734/Jaet.V7i2, April.21875>
- Sugiyono. (2017). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tinggi, S., Ekonomi, I., Lhokseumawe, S., Islam, U., & Banda, N. A. (2018). *Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi Cut Muftia Keumala Zamzami Zainuddin Pendahuluan Salah Satu Sumber Kebutuhan Utama Manusia Berasal Dari Sektor. 9*, 129–149.
- Yusmini, & Heriyanto. (2011). *Analisis Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Isbn 978-979-3793-71-9*. 141–149.
- Yusmini, & Heriyanto. (2016). *Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pasar Lelang Sebagai Solusi Mewujudkan Kedinamisan Kesejahteraan Petani*. 52–63.
- Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). Perilaku Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dan Pola Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 102–112. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.102-112>